

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi adalah suatu gerakan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sejak era reformasi hingga pemerintah saat ini. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan adalah pada bidang pengelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah saat ini dihadapkan pada banyak tuntutan, baik internal berupa tuntutan akan perlunya peningkatan kinerja yang optimal maupun tuntutan eksternal seperti tuntutan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan, fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pemenuhan akan semua tuntutan internal maupun eksternal di atas merupakan implikasi logis dari suatu otonomi daerah yang diharapkan dan yang hanya akan tercapai, jika Pemerintah Daerah konsisten dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Rahmad:2015).

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari keberadaan beberapa Undang-Undang, seperti Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang semuanya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelolah keuangan daerah. Sementara dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,(3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5)

Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62 disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang di kelola oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sekaligus menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selain itu, LRA merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena informasi anggaran yang dibuat oleh pemerintahan merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Anggaran memiliki peran penting yang dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan sekaligus pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting relatif dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan lainnya, seperti neraca, laporan operasi dan laporan arus kas baru disusun setelah LRA dibuat. Salah satu unsur Laporan Realisasi Anggaran yang penting adalah Laporan Realisasi Anggaran pendapatan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan terkait dengan upaya peningkatan pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk akuntansi pendapatan harus cukup mendapat perhatian. Akuntansi pendapatan merupakan suatu hal yang sering menjadi salah satu perhatian utama dalam berbagai entitas,

baik publik maupun komersil. Menurut PSAK No.23 Tahun 2015 Paragraf ke 07, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus kas masuk ke dalam entitas mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari pendapatan, maka hal tersebut bukanlah merupakan pendapatan dari aktivitas normal tetapi dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain. Besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu entitas akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh.

Kabupaten Ngada seperti layaknya kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi NTT juga sangat memerlukan pendapatan daerah, guna menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi dalam konteks yang lebih luas tidak hanya terkait dengan otonomi dalam pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya, tetapi juga harus berimplikasi pada otonomi keuangan daerah secara menyeluruh dalam rangka pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah.

Oleh karena itu instansi yang paling bertanggung jawab terhadap mengelola keuangan pendapatan daerah adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada (BKKN). Aparatur yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan pendapatan daerah dituntut untuk memiliki pemahaman serta kemampuan teknis yang memadai berkaitan dengan akuntansi pendapatan, baik yang berkaitan dengan pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement/valuation*) serta pelaporannya (*reporting*).

Cicilia (2015) dalam penelitiannya menemukan fakta kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten dalam menyelenggarakan proses pencatatan sistem akuntansi pendapatan daerah sebagai faktor penyebab terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan

pendapatan sesuai standar akuntansi (SAP) dalam laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur daerah yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai di bidang akuntansi, serta tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Fenomena lainnya yang sering terjadi sebagaimana ditemukan oleh Cicilia (2015) dalam penelitiannya adalah masih banyaknya laporan keuangan PEMDA yang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akrual sehubungan dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2007.

Dalam *preliminary study* sebelum dilakukannya penelitian ini sayapun menemukan adanya indikasi permasalahan yang sama, yaitu kurangnya tenaga akuntansi yang handal dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Ngada, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun salah satu permasalahan lain yang terkait dengan akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2017) adalah lemahnya pengendalian intern atas proses penatausahaan pendapatan. Salah satu contohnya adalah yang berkaitan dengan lemahnya pengendalian intern sehubungan dengan penatausahaan penerimaan (pendapatan) dana BOS dan dana lain yang tidak melalui rekening umum kas daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Ngada menurut BPK belum memiliki kebijakan akuntansi dan sistem yang mendukung dana hibah yang tanpa melalui dana kas umum daerah, termasuk dana BOS.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena di atas dengan judul **“Evaluasi**

Penerapan Akuntansi Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kita uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Prosedur akuntansi pendapatan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun anggaran 2017 ?
2. Apakah akuntansi penerepan prosedur pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada telah sesuai dengan PP 71 Tahun anggaran 2010?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam prosedur akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun anggaran 2017?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur penerapan akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun anggaran 2017.
2. Untuk memastikan Prosedur penerapan akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses penerapan akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Tahun anggaran tahun 2017.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terutama dalam kaitannya dengan akuntansi pendapatan khususnya pada sektor publik.

2. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam proses pencatatan akuntansi pendapatan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi maupun referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan isu penelitian yang sama dengan penelitian ini